



UKI PRESS
Jl. Mayjen Sutoyo no. 2 Cawang 13630



PROSIDING SEMINAR NASIONAL & CALL FOR PAPERS



**SEMINAR NASIONAL &
CALL FOR PAPERS**
REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS
KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA

PUSAT STUDI LINTAS AGAMA DAN BUDAYA UKI
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UKI
MAGISTER PENDIDIKAN AGAMA KRISTEN UKI.

Jakarta, 22 November 2018
Auditorium Griha William Soeryadjaya
Gedung FK UKI, Cawang, Jakarta

PROSIDING

“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN BERDASARKAN PANCASILA”

Susunan Panitia

Penasehat

: Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA
(Rektor UKI)
Pdt. Wellem Sairwona, M,Th

SC

: Prof. Dr. Charles Marpaung
Dr. Wilson Rajagukguk, M.Si.,MA
Wakil Rektor Bidang Akademik (WRA)
Dr. Bernadetha Nadeak, M.Pd.,PA.
Wakil Rektor Bidang Keuangan, SDM dan Administrasi Umum (WRKSA)
Dr.rer.pol., Ied Veda R. Sitepu, SS., MA.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Hukum dan Kerjasama (WRKK)

Penanggungjawab

: Dr. Wahyu Astjarjo Rini, M.A, M.Pd. K
Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya

Ketua

: Pdt. Ester Rela Intarti, M.Th

Sekretaris

: Pdt. Indri Jatmoko, S.Si (Teol)., M.M.

Sekretariat

: Decmoon Destine, S.Pd

Bendahara

: Ir. Edison Siregar, M.M
Elferida Sormin , S.Si., M.Pd

Koor Acara

: Pdt. Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th
Pdt. Indri Jatmiko, S.Th., M.M

Koor Prosiding

: Dr. Lamhot Naibaho, M.Pd.
Dr. Demsi Jura, M.Th.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.

Koor Perlengkapan

: Hotma Parulian Panggabean, SE., M.Ak.

Koor Keamanan

: Dandy Sendayu Noron, S.Sos

Koor Pubdekdok : Dr. A. Dan Kia, M.Th
Jehezkiel Sandi Juli Handoko, A.Md.

Koor Konsumsi : Ledyana Efarida, A.Md.,
Rotua Vicky Ria, SE

Reviewer : Dr. Demsy Jura, M.Th.
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor : Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Demsy Jura, M.Th.

PROSIDING

**“REVITALISASI INDONESIA MELALUI IDENTITAS KEMAJEMUKAN
BERDASARKAN PANCASILA”**

Reviewer:

Dr. Demsey Jura, M.Th.
Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Sidik Budiono, S.E., M.E.
Dr. Gindo E.L. Tobing, S.H., M.H.
Dr. Desi Sianipar, M.Th.
Dr. Dirk Roy Kolibu, M.Th.

Editor:

Dr. Lamhot Naibaho, S.Pd., M.Hum.
Dr. Demsey Jura, M.Th.

ISBN: 978-979-8148-96-5

Penerbit
UKI Press
Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630
Telp.(021)8092425, ukipress@uki.ac.id
Cetakan 1, 2018

**UKI Prees
2018**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang penuh berkat dan rahmat atas perkenanNya serta dukungan dari pimpinan Universitas Kristen Indonesia Seminar Nasional dan call for paper dengan tema *Revitalisasi Indonesia melalui identitas Kemajemukan berdasarkan Pancasila* yang telah diselenggarakan pada tanggal 22 November 2018 dapat terlasana dengan baik dan Prosiding ini dapat diterbitkan.

Tema dalam seminar nasional ini dipilih dengan alasan, pertama sebagai wujud kontribusi Universitas Kristen Indonesia yang telah berusia 65 sejak berdiri pada 15 Oktober 1953 dengan turut serta berpartisipasi mencerdaskan kehidupan bangsa seperti diamanatkan dalam UUD 1945. Panggilan tersebut bertugas membentuk calon pemimpin yang cakap dan profesional, beriman dan berwawasan Oikumenis, serta berkarakter dan bervisi pelayanan bagi kemanusiaan dengan membawa serta, damai dan sejahtera, peka dan mampu menanggapi kebutuhan masyarakat dengan wawasan kebangsaan dalam rangka kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Alasan yang kedua, untuk menghimpun berbagai pemikiran dan wawasan serta pengalaman dari para pembicara dalam rangka membangun jati diri terhadap identitas kemajemukan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Seminar nasional ini dihadiri oleh Bp. Lukman Hakim, Menteri Agama Republik Indonesia, sebagai keynote speaker, dan Bp. Ahmad Basarah, Wakil Ketua MPR RI, sebagai pembicara utama serta para akademisi pemakalah dari berbagai kampus atau universitas, sekaligus bertukar informasi dan memperdalam masalah fenomena kehidupan berbangsa dan bernegara.

Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada keynote speaker, pembicara utama, Pimpinan Universitas Kristen Indonesia, pemakalah/nara sumber, moderator, peserta, panitia, para alumni, para mahasiswa serta seluruh stake holder yang telah berupaya mensukseskan seminar nasional ini.

Jakarta, 18 Maret 2019

Ketua LPPM UKI

Dr. Aartje Tehupeiory, S.H.,M.H

DAFTAR ISI

Kata Pengantar		i
Daftar Isi		ii
Keynote Speakers		
1	Pancasila sebagai Identitas Pemersatu Kemajemukan Indonesia: Tinjauan Ketatanegaraan. Ahmad Basarah (Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia) MPR RI.	1
2	Revitalisasi Indonesia melalui Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila. Lukman Hakim Saifuddin (Menteri Agama Republik Indonesia)	11
Speakers		
3	Membumikan Pancasila: Aktualisasi Nilai dan Pembudayaan Karakter. Benny Susetyo Pr. (Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah UKP-PIP)	16
4	Membangun Budaya Toleransi Berbasis Wawasan Kebangsaan Guna Memperkuat Kedaulatan Indonesia. Prof. Dr. Muhammad AS. Hikam, APU. (Dosen Universitas Presiden)	22
5	Generasi Muda dan Identitas Kemajemukan Indonesia di Kancah Internasional. Biondi Sima, M.Sc, LL.M & Zeva Sudana, M.A (Co-chairs Indonesian Youth Diplomacy (IYD))	35
6	Mengelaborasi peran strategis Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya dalam menyemai identitas kemajemukan Indonesia. Wahyu A. Rini (Kepala Pusat Studi Lintas Agama dan Budaya Universitas Kristen Indonesia).	49
Pemakalah		
7	Membangun Jejaring Lintas Agama dan Budaya untuk Menjaga Kemajemukan dalam Penguatan Karakter Bangsa. Aartje Tehupeiory (Universitas Kristen Indonesia)	59
8	Membangun Ketahanan Nasional yang Berkelanjutan dalam Konteks Kemajemukan Bangsa Indonesia. George Royke Deksin (Akademi Militer Magelang)	68

9	Meneguhkan Identitas Kemajemukan Berdasarkan Pancasila sebagai Perikat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mukhtadi (Universitas Pertahanan).	82
10	Gaya Kepemimpinan yang Berintegritas Pancasila. Petrus Danan Widharsana, S. Pantja Djati (Universitas Mercu Buana Jakarta), St. Hendro Budiyanto, M. M	94
11	Membangun Budaya Toleransi melalui Dunia Nyata. Mariani Harmadi (STT Baptis Semarang)	102
12	Pendidikan Pancasila sebagai Resolusi Mengatasi <i>Hate Speech</i> di Media Sosial dalam Pemilu Nasional 2019. Fransiskus X. Gian Tue Mali, M.Si (Universitas Kristen Indonesia)	115
13	Pendidikan sebagai Ujung Tombak Kerukunan Antar Umat Beragama. E. Handayani Tyas (Universitas Kristen Indonesia)	137
14	Revitalisasi Ekonomi Pancasila melalui Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) Berbasis Potensi Lokal. Katiah (Prodi Pendidikan Tata Busana, FPTK, Universitas Pendidikan Indonesia), Supriyono (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia), Asep Dahliyana (Departemen Pendidikan Umum, FPIPS, Universitas Pendidikan Indonesia)	147
15	Membangun Jejaring Lintas Budaya dan Agama untuk Menjaga Kemajemukan. Antie Solaiman (Universitas Kristen Indonesia)	160
16	Kebijakan Publik bila Mencantumkan Aliran Kepercayaan dalam Administrasi Kependudukan sebagai Bentuk Revitalisasi Pancasila. Rospita Adelina Siregar (Universitas Kristen Indonesia)	173
17	Model Pendidikan yang Cocok dalam Masyarakat Majemuk di Indonesia: Pendidikan Agama yang Inklusif dan Pendidikan Agama yang Multikultural. Fredik Melkias Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	178
18	Peranan Mahasiswa dalam Merajut Kerukunan Antar Umat Beragama dalam Perspektif Kekristenan. Esther Relat Intarti (Universitas Kristen	191

	Indonesia)	
19	Etika Teologi Politik: Analisis Etis Teologis Ketaatan kepada Pemerintah. Noh Ibrahim Boiliu (Universitas Kristen Indonesia)	199
20	Peran Pendidikan Agama Kristen di Universitas Kristen Indonesia dalam Konstelasi Nasional Pembangunan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Dirk Roy Kolibu (Universitas Kristen Indonesia)	210
21	Pendidikan Multikultural untuk Anak melalui Belajar Injil Yohanes supaya Terbangun Semangat Penerimaan dalam Kehidupan Berbangsa. Yohanes Patar Parulian (Universitas Kristen Indonesia)	223
22	Pendekatan Tipologi Tripolar Alan Race dalam Keberagaman Agama di Indonesia. Demy Jura (Universitas Kristen Indonesia)	232
23	Peran Orang Tua dalam Mengantisipasi Radikalisme pada Anak. Merci Merliana Laik (Universitas Kristen Indonesia)	246
24	Hospitalitas sebagai Praksis Kristiani dalam Memberdayakan Disabilitas Korban Kekerasan. Alfonso Munte (Universitas Indonesia)	255

Gaya Kepemimpinan yang Berintegritas Pancasila

Petrus Danan Widharsana
Pantja Djati
St. Hendro Budiyanto, M. M

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas kebangsaan yang dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, menganalisis bentuk kepemimpinan yang dijiwai Pancasila serta mengetahui sejauh mana tokoh masyarakat, agama, pejabat publik dan elit politik mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Disini Pancasila dibahas sebagai pembentuk Integritas seorang pemimpin. Hal itu penting, karena hal tersebut erat hubungannya dengan fokus kepemimpinannya untuk menyejahterakan rakyat. Semakin korup – artinya, semakin rendah integritasnya - semakin berkurang pula fokus kepemimpinannya untuk menyejahterakan rakyat.dalam kajian kepemimpinan. Tolok ukur integritas kepemimpinan khas Indonesia itu sudah kita miliki. Tolok ukur tersebut sudah ada pada nilai-nilai Pancasila. Sejak negara Indonesia merdeka, bangsa kita sudah memiliki konsensus bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 45, adalah jiwa dan ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia. Artinya, setiap warga negara Indonesia, khususnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat publik dan elite politik diharapkan memiliki integritas kebangsaan yang dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila itu. Pancasila merupakan ideologi negara-bangsa dilihat dari sumber pembentuknya yang abstrak. Praktek Kepemimpinan Pancasila juga mengambil contoh dari kedua pemimpin yaitu Ir. Soekarno dan Ki Hadjar Dewantara. Relevansi Pancasila sebagai konsep dasar kepemimpinan negara-bangsa Indonesia dirangkai dalamsatu kajian ilmiah. Penelitian ini menggunakan teori kepemimpinan karismatik dalam ruang lingkup publik, teori pendidikan kuno (jawa), teori kebudayaan dan kearifan lokal, serta teori filsafat proses. Penelitian ini mengambil metode kualitatif deskriptif dengan model analisis isi (kontent analysis)

Kata kunci: Pancasila, Integritas, Gaya Kepemimpinan, Teori Filsafat Proses

I. Pendahuluan

Ketika membaca berita “Mahathir Mohamad resmi menjadi Perdana Menteri Ketujuh Malaysia” (Ardi Priyatno Utomo, 2018), saya terhenyak. Dalam hati saya bertanya mengapa rakyat Malaysia memilih seseorang yang sudah berumur 92 tahun, untuk memerintah (lagi);

apalagi mengingat sebelumnya Mahathir pernah menjabat sebagai PM Malaysia selama 22 tahun (dari tahun 1981-2003). Di antara banyak faktor penentu kemenangan Mahathir, isu korupsi dari pemerintah sebelumnya, khususnya skandal 1MDB, tentulah menjadi salah satu

faktor utama, sebab itulah isu yang secara vokal diserukan oleh Mahathir.

Saya mengambil contoh terpilihnya Mahathir untuk menunjukkan betapa rakyat di seluruh dunia merindukan pemimpin yang memiliki integritas yang tinggi. Integritas berarti adanya konsistensi nilai yang diyakini seseorang dan diterapkannya nilai tersebut dalam kehidupannya. Jadi ada keselarasan antara keyakinan, perkataan dan perbuatan seseorang. Ketika Mahathir menjabat PM Malaysia selama 22 tahun tidak sedikit kebijakannya yang kontroversial. Namun demikian, secara umum integritas kepemimpinannya tidak diragukan. Tidak ada indikasi bahwa ia melakukan korupsi. Mantan Menteri Hukum Zaid Ibrahim menulis dalam memoarnya, "*Dalam hati saya, saya tidak bisa menerima tuduhan bahwa Dr Mahathir adalah orang yang korup. Orang korup tidak pernah berani bicara selantang Dr Mahathir. Kekayaan bukan motivasinya. Ia hanya ingin berkuasa.*" (Zaid Ibrahim, 2009). Integritas seorang pemimpin itu penting, sebab hal tersebut erat hubungannya dengan fokus kepemimpinannya untuk menyejahterakan rakyat. Semakin korup – artinya, semakin rendah integritasnya - semakin berkurang pula fokus kepemimpinannya untuk menyejahterakan rakyat. Perhatiannya lebih banyak tertuju pada kepentingan diri sendiri dan kelompoknya.

Kita pantas bersyukur, bagi bangsa Indonesia tolok ukur integritas khas Indonesia itu sudah kita miliki. Tolok ukur tersebut sudah terpateri pada nilai-nilai Pancasila. Sejak negara Indonesia merdeka, bangsa

kita sudah memiliki konsensus bahwa nilai-nilai Pancasila, seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 45, adalah jiwa dan ideologi terbaik bagi bangsa Indonesia. Artinya, setiap warga negara Indonesia, khususnya para tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat publik dan elite politik diharapkan memiliki integritas kebangsaan yang dilandasi dan dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila itu. Mengapa fokus pada tokoh masyarakat, agama, pejabat publik dan elit politik? Karena masyarakat kita masih bersifat paternalistik. Orientasi masyarakat kita masih bertumpu pada para pemimpin, baik pemimpin formal (pejabat publik, elit politik) maupun informal (tokoh agama, ulama, tokoh masyarakat). Integritas pancasilais harus dimulai dari para pemimpin ini. Kalau semua pemimpin memiliki dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan yang sama, akan tercipta iklim pancasilais itu di negeri kita dan pada gilirannya akan merembet ke seluruh rakyat.

II. Kajian Pustaka

Masalahnya, sejarah menunjukkan Pancasila yang telah dijadikan dasar negara Indonesia ternyata sejak awal tidak selalu benar-benar dihayati oleh para pemimpin, baik pemimpin formal maupun informal. Dengan kata lain, para pemimpin Indonesia sendiri masih belum sepenuhnya memiliki integritas pancasilais. Bahkan upaya untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain datang silih berganti sampai saat ini; mulai dari ideologi agama, sampai ideologi ateis; mulai dari gerakan kecil-kecilan sampai ke pemberontakan fisik. Energi yang

dibutuhkan untuk menanggulangi berbagai paham dan gerakan tersebut menyebabkan tertatih-tatihnya perjalanan menuju tercapainya cita-cita bangsa yang berlandaskan Pancasila ini.

Kondisi ini masih diperparah lagi oleh sikap para pemimpin yang sering bermentalitas korup. Catatan kelam perilaku koruptif para pengusaha dan pejabat negara menghiasi dunia pemberitaan sejak Indonesia merdeka hingga sekarang. Pemerintahan sudah beberapa kali berganti tetapi korupsi di kalangan elit Indonesia belum bisa diberantas sepenuhnya. Bahwa praktik koruptif masih terus berlangsung di kalangan elit Indonesia hingga saat ini terlihat dari data penanganan kasus-kasus korupsi di Indonesia. Data statistik KPK menunjukkan secara keseluruhan, sejak 2004 hingga Maret 2017, KPK telah menangkap 643 pejabat baik swasta maupun pemerintah yang tersangkut kasus korupsi; 127 di antaranya adalah anggota DPR atau DPRD, 60 walikota/bupati atau wakilnya, dan 17 orang gubernur; mereka ini semua adalah pejabat-pejabat yang dipilih langsung oleh rakyat (katadata.co.id, 2017).

Yang juga menyedihkan, perilaku koruptif ini ternyata juga terjadi di kalangan penegak hukum (hakim, jaksa, polisi, pengacara). Menurut Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dalam acara diskusi Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin) di Resto 5, Cikini, Jakarta, Selasa (24 Januari 2017), sejak berdiri sampai Januari 2017 KPK telah menangani 43 aparat penegak hukum (APH) yang terjerat kasus korupsi. Dari 43 orang tersebut,

terbanyak adalah hakim. Modusnya sebagian besar penyuaipan (36 orang), dua orang melakukan pemerasan, dua orang terkait pengadaan barang dan jasa dan tiga orang melakukan tindak pidana pencucian uang (Yustinus Paat, 2017). Data dari *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2017 menunjukkan Indonesia masih menempati peringkat 96 dari 180 negara paling korup (liputan6.com, 2018). Mengingat sifat paternalistis masyarakat kita, bisa dibayangkan jika atasan suatu lembaga publik saja korup, apalagi anak buah di lingkungan kerjanya. Inilah penyebab beratnya proses menuju tercapainya cita-cita bangsa. Bukan Pancasilanya yang salah, tetapi para pemimpinnya yang tidak menunjukkan jiwa pancasilais.

Minimnya keteladanan jiwa pancasilais di kalangan elit politik berimbas pada semakin memudarnya nilai-nilai toleransi, persatuan, bela rasa, gotong royong, dst. yang merupakan unsur-unsur penting dalam nilai-nilai Pancasila. Memang ajakan, himbauan, anjuran, bahkan produk hukum untuk mengamalkan Pancasila tidak kurang-kurang dikumandangkan. Tetapi karena kurangnya keteladanan terjadilah kevakuman nilai. Inilah yang memberikan peluang bagi nilai-nilai non-pancasilais, bahkan anti-pancasilais, seperti paham-paham radikal, untuk merasuki hati sebagian rakyat Indonesia. Fenomena masuknya paham radikal ini tampak dari semakin meningkatnya keberanian sekelompok radikal, sayangnya termasuk beberapa tokoh formal dan informal, dalam menebarkan ujaran anti-Pancasila dengan dalih nilai-nilai agama, baik

secara langsung di tengah masyarakat, maupun lewat media daring.

Sahal Muhammad mencatat Indonesia telah mengalami ancaman besar dari sisi pemuda, yang digadang-gadang sebagai tulang punggung bangsa. *“Merebaknya fenomena radikalisme Islam di kalangan pemuda terutama terjadi di kampus-kampus besar merupakan sebuah kecolongan besar bagi masa depan bangsa, di mana mereka adalah calon-calon pemimpin masa depan. Jika hal ini terus terjadi kemungkinan besar Pancasila sebagai **Philosophische Grondslag** atau dasar negara akan segera tergantikan oleh syariat Islam atau khilafah melalui pemimpin-pemimpin yang berpaham fundamental”* (Sahal Muhammad, 2017). Paham-paham radikal inilah yang semakin menghambat terwujudnya cita-cita bangsa yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila. Para pemuka masyarakat dan agama yang menghembuskan paham tersebut berpendapat Pancasila adalah pesaing agama, maka harus dipinggirkan.

III. Pembahasan

Kita sudah merasakan akibat dari paham kelompok radikal ini. Setara Institute for Democracy and Peace mencatat sepanjang periode tahun 2007-2014 telah terjadi cukup banyak pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kurang lebih selama delapan tahun, terdapat 1.680 peristiwa yang bertentangan dengan kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan 2.268 tindakan pelanggaran. Rata-rata setiap tahunnya terjadi 210 peristiwa dengan 283 tindakan. Sebanyak 316 tempat

ibadah mengalami kerusakan seperti pembakaran dan penolakan izin pembangunan. Rincian dari 316 tempat ibadah tersebut antara lain, terdapat 20 tempat ibadah aliran kepercayaan, 163 gereja, 3 klenteng, 110 masjid (sebagian besar dari aliran keagamaan minoritas), 1 sinagog, 5 pura dan 14 vihara (Tim Viva, 2015). Belum terhitung bom yang meledak di berbagai tempat dan menelan banyak jiwa, khususnya sejak tahun 2005 sampai sekarang. Peristiwa terakhir adalah ledakan bom di 3 gereja di Surabaya dan menyusul di mapolrestabes Surabaya pada tanggal 13 Mei 2018, yang menelan belasan korban jiwa. Bukankah ini semua merupakan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila?.

Pancasila adalah ideologi bangsa yang mendasari kehidupan seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bersama yakni hidup yang rukun, damai, adil, makmur dan sejahtera. Bahwa sekarang ini tujuan tersebut belum tercapai sepenuhnya disebabkan kita masih berproses. Sedangkan agama mempunyai tujuan akhir hidup abadi di akherat. Jadi tidak seimbang jika keduanya dibenturkan. Namun demikian, satu hal yang jelas: Tuhan telah menempatkan kita di negara Indonesia yang dibentuk dengan kesepakatan para *founding fathers*, yang terdiri dari tokoh masyarakat dan agama waktu itu untuk mendasarkan negara Indonesia ini pada Pancasila. Itu berarti Pancasila bukan sekedar tidak bertentangan dengan agama, tetapi sangat selaras dengan agama. Jika tidak demikian, para tokoh agama waktu itu pasti akan mati-matian menolaknya.

Dengan demikian, Pancasila menjadi konteks hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh warga negara Indonesia apa pun agamanya. Lewat konteks itulah kita berjalan menuju tujuan akhir hidup kita. Ibaratnya, dari Jakarta kita pergi ke Cirebon. Jalan terbaik yang tersedia adalah lewat tol Cipali. Jalan ini memudahkan kita mencapai Cirebon. Kalau Jakarta adalah awal hidup kita dan Cirebon adalah akhir hidup kita, maka tol Cipali adalah Pancasila-nya. Apa pun agama kita, kita semua menuju ke kehidupan abadi di akherat, dan Tuhan menyediakan negara Pancasila yang selaras dengan semua agama untuk kita jalani agar bisa hidup sejahtera di dunia menuju ke tujuan akhir di surga.

Dalam kondisi masyarakat seperti sekarang ini, apa yang mendesak untuk dilakukan agar nilai-nilai Pancasila bisa bergerak ke arus utama lagi? Penataran model P-4 zaman Orde Baru jelas tidak menarik lagi dan mungkin akan mendapatkan resistensi dari masyarakat. Penataran model P-4 terlalu bersifat indoktriner dan menjadikan masyarakat seperti masuk ke bangku sekolah lagi. Saya berpendapat, perlu ada suatu lompatan untuk mengembalikan jiwa Pancasila pada rakyat Indonesia, yang dimulai dari kalangan pejabat publik, tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Lompatan yang saya maksudkan adalah dengan menciptakan sistem assesmen kebangsaan.

Untuk tujuan itu, perlu disusun suatu instrumen assesmen yang mampu menilai kematangan jiwa Pancasila seseorang. Memang dalam penyaringan calon pegawai negeri

sudah ada mekanisme penyaringan lewat tes wawasan kebangsaan. Namun sejauh saya amati, tes tersebut lebih bersifat kognitif (pengetahuan) daripada sikap, pandangan hidup dan perilaku Pancasila. Sistem assesmen yang saya maksud adalah sistem assesmen mirip IQ test untuk mengukur kecerdasan intelektual, EQ test untuk kecerdasan emosional dan bahkan SQ test untuk kecerdasan spiritual. Rasanya tidak berlebihan kalau PQ (Pancasilais Quotient) test juga diterapkan untuk menilai kecerdasan Pancasila para pejabat publik, elit politik, tokoh-tokoh masyarakat dan agama. Assesmen ini diharapkan bisa mengungkapkan tingkat kecerdasan Pancasila seseorang dan dijadikan bahan pertimbangan dalam menempatkan mereka pada posisi kepemimpinan, baik di lingkungan layanan publik maupun kemasyarakatan.

Tentu saja, untuk menghindari kesan indoktriner dari tes ini, kita bisa memberi nama lain, misalnya Tes Kecerdasaan Kebangsaan (Nationality Quotient) atau Tes Kecerdasan Patriotisme (Patriotism Quotient). Apa pun namanya, tujuan dari PQ tes ini adalah untuk memberikan gambaran komprehensif terhadap kecerdasan Pancasila seseorang. Maka muatan yang terkandung di dalamnya terfokus pada nilai-nilai Pancasila. Beberapa pokok berikut mungkin bisa dijadikan pertimbangan: a) Terkait sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Fokus tes kecerdasan Pancasila terkait sila pertama harus ditempatkan pada sikap dan pandangan hidup serta kemampuannya untuk bertoleransi terhadap sesamanya yang beragama lain. Sikap intoleran yang merebak

dewasa ini menjadi keprihatinan kita semua. Kalau sikap seperti ini kita biarkan terus berkembang, cita-cita negara Pancasila akan semakin jauh dari jangkauan. Agama yang seharusnya memperkuat rasa cinta kita kepada kemanusiaan, justru akan dijadikan alat untuk menghancurkan kemanusiaan. Agama yang seharusnya menebarkan budaya kehidupan, justru akan dijadikan alat untuk menebarkan budaya kematian. Assesmen terhadap sikap dan pandangan hidup yang toleran akan menjadi faktor penentu untuk menilai apakah seseorang memiliki kecerdasan pancasilais atau tidak. Tes ini juga diharapkan bisa mengungkap sikap seseorang manakala terjadi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan, perusakan rumah-rumah ibadat, terorisme termasuk bom di rumah-rumah ibadat, ujaran kebohongan (hoax) dan kebencian terhadap agama yang bukan menjadi keyakinannya; b) Terkait sila kedua “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Fokus tes kecerdasan pancasilais terkait sila kedua harus ditempatkan pada sikap dan pandangan hidup serta kemampuannya untuk menghormati dan menghagai martabat manusia. Ini tercermin dari kepeduliannya terhadap orang lain. Termasuk di antaranya: bagaimana ia menjaga keharmonisan rumah tangganya, mendidik anak-anaknya untuk tidak bersikap egois, memelihara hubungan baik dengan tetangga, bersikap ramah dengan senyum, sapa dan salam dalam berhubungan dengan orang lain, rela dan ikhlas menolong sesamanya, menghormati hak asasi manusia, dan seterusnya. Sikap-sikap ini pada hakekatnya merupakan

perpanjangan dari sikap toleransi yang mengalir dari hidup keagamaannya; c) Terkait sila ketiga “Persatuan Indonesia”. Fokus kecerdasan pancasilais terkait sila ketiga harus ditempatkan pada sikap dan pandangan hidup serta kemampuannya untuk mencintai tanah airnya (patriotisme). Persatuan Indonesia hanya bisa diwujudkan jika warga negara Indonesia benar-benar memiliki rasa cinta pada tanah airnya. Salah satu inti dari rasa cinta pada tanah air adalah kesediaan seseorang untuk memupuk solidaritas sosial. Koentjaraningrat (1990:164), menyatakan bahwa solidaritas adalah suatu bentuk kerjasama pada masyarakat yang meliputi aktivitas gotong royong, tolong menolong dan musyawarah. Orang yang memupuk solidaritas sosial menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, toleransi, budaya nasional, lingkungan hidup (“tanah” dan “air”), serta perhatian kepada kaum duafa. Di samping itu, harus diuji juga keterlibatan seseorang dalam penggunaan dan penjualan obat-obatan terlarang (narkoba), sebab penggunaan dan pejualan narkoba mempunyai korelasi yang kuat dengan lemahnya jiwa patriotisme seseorang; d) Terkait sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Fokus kecerdasan pancasilais terkait sila keempat ini harus ditempatkan pada integritas seseorang sebagai seorang pemimpin. Di atas sudah disinggung betapa perilaku koruptif masih menjadi ancaman bagi pembangunan dan kemajuan bangsa. Oleh karena itu instrumen PQ test harus bisa mengungkapkan apakah seseorang memiliki kadar integritas yang tinggi.

Di samping integritasnya, ia juga harus diuji untuk bisa bekerja dengan transparan. Seringkali korupsi diawali dengan cara kerja yang tidak transparan dengan cara-cara memanipulasi data dan transaksi, sehingga sepiantas hasil kerjanya tampak baik, tetapi sebenarnya banyak hal busuk di dalamnya. Tidak boleh dilupakan, sila keempat juga menekankan pentingnya musyawarah untuk mufakat. Maka instrumen ini juga harus mengungkap kemampuan orang membangun kerja sama tim yang kuat yang sebenarnya mencerminkan semangat gotong royong tanpa pandang bulu; e)Terkait sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Fokus kecerdasan pancasilais terkait sila kelima ini harus ditempatkan pada kemampuan seseorang untuk bertindak adil dengan mengesampingkan unsur-unsur primordialisme. Sudah menjadi rahasia umum banyak terjadi “klik-klik” primordial di kalangan pejabat publik, bahkan di lembaga-lembaga pendidikan negeri. Ini menunjukkan bahwa nilai-nilai kebenaran dan keadilan sering dikaburkan oleh primordialisme. Di samping itu, kesan “hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas” masih terasa kental di masyarakat. Oleh karena itu, seseorang yang adil harus mampu menempatkan kebenaran dan keadilan tanpa pandang bulu ketika harus membuat kebijakan atau keputusan. Namun demikian, sikap adilnya tidak boleh melupakan unsur empati terhadap orang lain. Keadilan sosial mengimplikasikan pentingnya pemerataan dan kesejahteraan bagi semua warga. Kemampuan dan kesediannya untuk berpartisipasi

dalam menolong sesamanya perlu mendapatkan penilaian juga. Hal ini terlihat dari sikap dan perilakunya terhadap orang lain, khususnya mereka yang menderita, ketaatannya membayar pajak, kepatuhannya pada tata tertib termasuk tata tertib berlalu lintas, kemurah-hatiannya dan sikapnya dalam menjaga keutuhan keluarga.

IV. Kesimpulan

Jika assesmen tersebut bisa dilakukan secara obyektif dan ilmiah dengan melibatkan ahli-ahli yang kompeten di bidang assesmen kepribadian, kita sudah membuat lompatan besar untuk menampilkan kembali nilai-nilai Pancasila ke arus utama. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila perlu mempertimbangkan hal ini dengan matang. Jika para pemimpin, baik formal maupun informal, benar-benar terpilih dari orang-orang yang memiliki kecerdasan pancasilais yang memadai, dapat dipastikan iklim pancasilais akan menguasai negeri ini. Paham-paham non-pancasilais atau anti-pancasilais tidak akan mendapatkan angin atau peluang untuk bertumbuh dan berkembang. Pertanyaannya adalah apakah para pemimpin negeri saat ini menyadari urgensi untuk melakukan lompatan semacam ini untuk memulihkan peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara? Sejarah akan membuktikannya.

Daftar Pustaka

Ibrahim, Zaid. (2009), *Saya Pun Melayu*. Petaling Jaya, Malaysia: ZI Publications. hlm. 227. ISBN 978-967-5-26603-4.

- Katadata.co.id (2017),
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/06/21/ternyata-pejabat-swasta-paling-banyak-tertangkap-korupsi-kpk>.
- Koentjaraningrat (1990), *Metode-Metode Antropologi dalam Penyelidikan-Penyelidikan Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, hal. 164.
- Liputan6 news (2018),
<https://www.liputan6.com/news/read/3311878/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2017-stagnan-tetap-di-skor-37>.
- Paat, Yustinus, *KPK Telah Tangani 43 Aparat Penegak Hukum Terjerat Korupsi*,
<http://www.beritasatu.com/hukum/410882-kpk-telah-tangani-43-aparat-penegak-hukum-terjerat-korupsi.html>.
- Sahlan, Muhammad (2017), *Bahaya Radikalisme Agama terhadap Ketahanan Pancasila*,
<http://www.nu.or.id/post/read/78247/bahaya-radikalisme-agama-terhadap-ketahanan-pancasila>
- Tim Viva, 2015, *Delapan Tahun, 316 Tempat Ibadah Dirusak dan Ditolak Massa*,
<http://www.viva.co.id/berita/nasional/628334-delapan-tahun-316-tempat-ibadah-dirusak-dan-ditolak-massa>.
- Tyas, E. H., & Naibaho, L. (2018). *Kepemimpinan: Gaya Dan Peranannya Dalam Melaksanakan Revolusi Mental*.
- Utomo, Ardi Priyatno (2018), *Mahathir Mohamad Resmi Menjadi Perdana Menteri Ketujuh Malaysia*,
<https://internasional.kompas.com/read/2018/05/10/22511231/mahathir-mohamad-resmi-menjadi-perdana-menteri-ketujuh-malaysia>.
- Widharsana, Petrus Danan (2018), *Mengamalkan Pancasila dalam terang Iman Katolik*, Yogyakarta: Kanisius.